

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. (2014). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *Tentang Pembendaharaan Negara*.
- _____, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 *Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007*. (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. (2013). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 *Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. (2015). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Internal*. (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akutansi Pemerintah*. (2010). Jakarta.

- Boyle, E.J., Cooper, S.M. & Geiger, M.A. (2004). 'An empirical analysis of internal control weaknesses under SAS no. 78: an examination of state audit reports'. *Accounting Faculty Publications*. Page. 1-16.
- Damayanti, T.W. & Sari, P.S. (2011). 'Kelemahan material: analisis atas ukuran pemerintahan dan belanja modal serta dampaknya terhadap opini auditor (studi pada Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah)'. *JMK*, Vol. 9, No. 2, hlm. 42-68.
- Erlina. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 dan permendagri nomor 64 tahun 2013*. Salemba Empat.
- Fauza, N. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah'. *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-15.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hartono, R., Mahmud & Utaminingsih, N. S. (2014). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern'. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram*, Lombok, hlm. 1-13.
- Kawedar, W. (2009). 'Opini audit dan sistem pengendalian internal'. *Journal of Accounting and Auditing*, vol. 6, No. 1, hlm. 1-15.
- Kristanto, S. B. (2009). 'Pengaruh ukuran pemerintahan, pendapatan asli daerah (PAD), dan belanja modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal'. *Jurnal UKRIDA*, Vol. 9, No. 1, hlm. 41-62.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Martani, D. & Zaelani, F. (2011). 'Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di Indonesia'. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, hlm. 1-27.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nurwati, I. & Trisnawati, R. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah (studi kasus pada

kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah periode 2011-2012)'. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, hlm. 363-373.

Petrovits, C., Shakespeare, C. & Shih, A. (2010). 'The causes and consequences on internal control problems in nonprofit organizations'. *American Accounting Association*, Vol. 86, No. 1, Page. 1-38.

Rachmawati, D. E. & Handayani, N. (2016). 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota'. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No.4, hlm. 1-17.

Raharjo, E. (2007). 'Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi'. *Fokus Ekonomi*, vol. 2, no. 1.

Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sari, I. P. (2016). 'Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah'. *Jom FEKON*, Vol. 3, No, 1, hlm. 679-692.

Saputro, E. A. & Mahmud, A. (2015). 'Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah'. *Accounting Analysis Journal*, hlm. 1-9.

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suwanda, D. & Dalibas. (2013). *Sistem pengendalian internal pemerintah daerah*, PPM.

Tunggal, A. W. (2014). *Mendeteksi kecurangan dalam akuntansi*. Harvarindo.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Yamin, R. & Sutaryo. (2015). 'Faktor penentu jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah di Indonesia'. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, hlm. 1-24.